

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Aylordan Bodgan, (2006). Metode Penelitian Sosial, beberapa alternatif pendekatan, Jakarta, Kencana.
- AfrizaL, (2014). Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,
- Singarimbun, Masri. (1989). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, (2010). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Indrajit, Richardus Eko, (2006). Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrajit, Richardus Eko, Dudy Rudianto & Akbar Zainuddin, (2007). Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara, Yogyakarta: Aptikom
- Insititut Teknologi Sepuluh Nopember, (2019) Smart City : konsep, Model, & Teknologi, Surabaya: AISINDO

Jurnal:

- Husnia, F. N., Hidayat, K., & Dewantara, R. Y. (2016). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-Pbb)(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Nur Fadhilah, A. N. I. S., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 7(4).

- Rahaju, T. (2018). Analisis Kesiapan Inovasi Layanan Sistem Informasi Manajemen Dan Pelayanan Perizinan Elektronik (Simpel) Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. *Publika*, 6(5).
- Tri Maharani, Rahmawati. (2016). Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 4(10).
- Sumarjono, S., Subarkah, S., & Suparno, S. (2018). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 19(1).
- Raihan, A. H., Amin, M. J., Si, M., Dama, M., Sos, S., & Si, M. (2017). Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Leonard, D., Mardawati, D., & Sari, D. (2018). Analisis Pemanfaatan E-puskesmas dengan Metode Performance, Information, Ekonomi, Control, dan Efisiensi, Service (Pieces) di Puskesmas Kota Padang. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 17-26.
- Arinda, P. R. (2014). Efektivitas Penerapan B-DISO (Banyuwangi Digital Society) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 360-366.
- Arief, V., & Yuardani, A. M. (2018). Efektivitas Penerapan Konsep E-Government Dalam Bentuk Aplikasi Elektronik Kelurahan Pada Kelurahan Sungaibangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 155-163.
- Rihardi, S. A., Yusliwidaka, A., & Mazid, S. (2019). Efektivitas Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa)(Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang). *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 70-81.
- Enitasari, R., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Public Administration Journal Of Research*, 1(2), 137-150.

Swadesi, U., & Sadad, A. (2017). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation, Riau University*).

Yasa'Abubakar, A., & Purnama, M. I. (2019). Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 1-32.

Ganing, A., Firdaus, M., & Chaerunisa, F. (2017). Efektivitas E-Puskesmas Di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar. Jurnal Administrasi Negara, 23(1), 1-9.

Nurwindiarti, M. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Management Publik, 4.

Booz, Allen, & Hamilton. (2001). *Balanced E-government : E-government Connecting Efficient Administration and Resposive Democracy*, Gütersloh, Jerman, Bertelsmann Foundation Publishing House.

Skripsi:

Hazid Jalma. 2019. Analisis Pemanfaatan Web OpenSID dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Skripsi. Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas.

Website:

https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media diakses pada tanggal 1 mei 2020

https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr diakses pada 4 Desember 2020, pada pukul 07.20

<https://klikpositif.com/baca/58216/lewat-sapo-rancak-urus-10-perizinan-di-kota-padang-ini-sudah-bisa-secara-online> diakses pada 5 Desember 2020 pada pukul 13.20

<https://sumbar.antaranews.com/berita/319432/dpmpmsp-padang-akui-akses-menuju-mal-pelayanan-publik-cukup-sulit> diakses pada 10 Desember 2020 pada pukul 13.00

<http://www.topsumbar.co.id/mengurus-perizinan-secara-online-sapo-rancak-diluncurkan/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pada pukul 12.40

<https://dpmpptsp.padang.go.id/> diakses pada tanggal 28 November 2020, pada pukul 20.00

Dokumen

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Pengembangan E-Government.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang 2020

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dengan CV. 6000 Group tahun 2020.



